

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Sabtu-Senin, 2-4 April 2022



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media online dan media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Independensi.com	Sabtu, 2 April 2022	Kementerian PUPR RI Mulai Bangun SPAM Regional Jatiluhur I	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) memulai pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I (SPAM Regional Jatiluhur I). SPAM ini memanfaatkan air baku dari Bendungan Jatiluhur di Provinsi Jawa Barat yang disalurkan melalui Saluran Tarum Barat.</p> <p>https://independensi.com/2022/04/01/pe-mbangunan-spam-regional-jatiluhur-i-dimulai-menteri-basuki-agar-selesai-tepat-waktu-untuk-perbaikan-lingkungan-jakarta/</p> <p>https://www.timesindonesia.co.id/read/news/403986/kementerian-pupr-ri-mulai-bangun-spam-regional-jatiluhur-i</p> <p>https://www.kompas.com/properti/read/2022/04/01/210000121/basuki-saya-ikut-berdosa-jika-tidak-berbuat-apa-apa-selamatkan-jakarta</p> <p>https://akurat.co/pembangunan-spam-regional-jatiluhur-i-dimulai-target-rampung-juni-2024</p> <p>https://www.industry.co.id/read/104832/pembangunan-spam-regional-jatiluhur-i-dimulai-menteri-basuki-agar-selesai-tepat-waktu-untuk-perbaikan-lingkungan-jakarta</p>
2	Inilah.com	Sabtu, 2 April 2022	Kementerian PUPR RI: Asrama Mahasiswa Nusantara di Surabaya Ditarget Selesai Mei 2022	<p>Kementerian PUPR mendapat tugas untuk membangun Asrama Mahasiswa Nusantara bagi mahasiswa dari berbagai daerah yang sedang kuliah di kota/kabupaten lain guna sebagai wadah pembinaan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bagi generasi muda di tingkat perguruan tinggi.</p> <p>https://www.inilah.com/asrama-mahasiswa-nusantara-di-surabaya-ditargetkan-selesai-mei-2022</p> <p>https://mitrapol.com/2022/04/03/pertama-di-indonesia-asrama-mahasiswa-nusantara-di-surabaya-ditargetkan-selesai-mei-2022/</p> <p>https://www.timesindonesia.co.id/read/news/404093/kementerian-pupr-ri-asrama-mahasiswa-nusantara-di-surabaya-ditarget-selesai-mei-2022</p> <p>https://www.kompas.com/properti/read/2022/04/03/143000021/intip-fasilitas-asrama-mahasiswa-nusantara-surabaya</p>

				https://www.beritasatu.com/ekonomi/911325/habiskan-rp-88-miliar-rusun-mahasiswa-nusantara-terapkan-arsitektur-tropis
3	Timesindonesia.co.id	Sabtu, 2 April 2022	Menteri PUPR RI Kukuhkan Pengurus Unit Pengumpul Zakat Kementerian PUPR RI	<p>Menyambut bulan suci Ramadan 1443 H Tahun 2022, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR RI) Basuki Hadimuljono mengukuhkan Pengurus Unit Pengumpul Zakat Kementerian PUPR RI periode tahun 2022-2027. Pengukuhan tersebut bersamaan dengan acara Silaturahmi Kementerian PUPR RI jelang Ramadan 1443 H bertajuk "Gapai Pahala Ramadan dengan Tetap Sigap Membangun Negeri", Jumat (1/4/2022).</p> <p>https://www.timesindonesia.co.id/read/news/403987/menteri-pupr-ri-kukuhkan-pengurus-unit-pengumpul-zakat-kementerian-pupr-ri</p> <p>https://www.inilah.com/sambut-ramadan-1443-h-menteri-basuki-kukuhkan-pengurus-unit-pengumpul-zakat-kementerian-pupr</p>
4	Kompas.com	Sabtu, 2 April 2022	Maisonet, Solusi Bangun Rumah di Kota Besar dengan Lahan Terbatas	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan solusi atas keterbatasan lahan untuk membangun rumah di kota-kota besar Indonesia. Ternyata, tipologi rumah maisonet bisa menjadi alternatif dalam membangun rumah di tengah keterbatasan lahan perkotaan.</p> <p>https://www.kompas.com/properti/read/2022/04/02/190000721/maisonet-solusi-bangun-rumah-di-kota-besar-dengan-lahan-terbatas</p> <p>https://ekonomi.bisnis.com/read/20220403/47/1518198/kementerian-pupr-punya-konsep-rumah-maisonet-untuk-perkotaan-seperti-apa-desainnya</p> <p>https://www.antaranews.com/berita/2798673/kementerian-pupr-rumah-inovatif-bisa-jadi-solusi-hunian-di-perkotaan</p>
5	Bisnis.com	Sabtu, 2 April 2022	Program Sejuta Rumah: Pemerintah Bidik Milenial dan Gen Z	<p>Kementerian PUPR terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan hunian terutama khususnya generasi milenial dan Gen Z lewat program Sejuta Rumah. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan selain menyediakan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tantangan lainnya ke depan adalah menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi generasi milenial dan Gen Z.</p> <p>https://ekonomi.bisnis.com/read/20220403/47/1518298/program-sejuta-rumah-pemerintah-bidik-milenial-dan-gen-z</p>

6	Liputan6.com	Sabtu, 2 April 2022	Percepat Bangun KIT Batang, Menteri Basuki Minta Tarik Tenaga Kerja Lokal	<p>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mendorong pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam jumlah banyak untuk membangun Kawasan Industri Terpadu Batang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah."Dalam proses pembangunan infrastruktur KIT Batang diharapkan semaksimal mungkin memanfaatkan tenaga kerja lokal dan produk dalam negeri," ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Minggu (3/4/2022).</p> <p>https://www.liputan6.com/bisnis/read/4928462/percepat-bangun-kit-batang-menteri-basuki-minta-tarik-tenaga-kerja-lokal</p>
---	--------------	---------------------	---	--

Judul	Tapera Kelola Dana KIK Rp 3 Triliun	Tanggal	2 April 2022
Media	Kompas, Halaman 9		
Resume	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna menyebutkan, 59,95 persen penduduk Indonesia bekerja pada sektor nonformal. Dari jumlah itu, 74 persen di antaranya belum memiliki rumah. Sedangkan dari 26 persen yang sudah memiliki rumah, 87 persen butuh perbaikan rumah.		

PROPERTI

Tapera Kelola Dana KIK Rp 3 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Pengelolaan dana tabungan perumahan rakyat melalui pasar modal terus digalirkan. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera hingga kini telah meluncurkan kontrak investasi kolektif atau KIK senilai total Rp 3 triliun.

BP Tapera meluncurkan KIK Pemupukan Dana Tapera (PDT) Pendapatan Tetap tanpa Penjualan Kembali pada 1 April 2022. Peluncuran KIK itu sebagai langkah lanjutan pengelolaan dana Tapera melalui pasar modal. Sebelumnya, BP Tapera telah meluncurkan KIK PDT Pasar Uang pada 26 Oktober 2021 dan KIK PDT Pendapatan Tetap pada 30 November 2021.

Komisiner BP Tapera, Adi Setianto, mengemukakan, KIK Pemupukan Dana Tapera merupakan suatu produk di pasar modal yang diperuntukkan bagi pengelolaan investasi pemupukan dana Tapera. Besaran dana pemupukan yang dialokasikan untuk ketiga jenis KIK adalah Rp 3 triliun. Pemupukan dana Tapera lewat pasar modal bertujuan untuk mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dengan langkah strategis ini, pengelolaan dana Tapera telah dijalankan secara optimal, baik untuk tujuan menjaga likuiditas maupun peningkatan nilai, sehingga dapat mendukung ketersediaan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara berkelanjutan," kata Adi, dalam keterangan pers, Jumat (1/4/2022).

Kontrak Pengelolaan Dana Tapera (KPDT) melalui KIK merupakan bagian dari pemupukan dana Tapera. Pembentukan wadah KIK mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, di mana BP Tapera menunjuk manajer investasi untuk pengelolaan KIK tersebut.

KIK Pasar Uang dan KIK Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali akan berfungsi sebagai proteksi likuiditas, dengan perkiraan komposisi mencapai 77 persen dari dana pemupukan. Sementara KIK Pendapatan Tetap akan berfungsi sebagai peningkatan nilai dengan komposisi sekitar 23 persen terhadap dana pemupukan.

Menurut Adi, BP Tapera telah menunjuk tujuh manajer investasi untuk mengelola KIK secara profesional, transparan, dan memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan amanat undang-undang. Tujuh manajer investasi itu yakni PT BNI Asset Management, PT Bahana TCW Investment Management, PT Batavia Aset Manajemen, PT Danareksa Investment Management, PT Mandiri Manajemen Investasi, PT Manulife Asset Management, dan PT Schroder Investment Management.

BP Tapera menjalankan tiga pilar bisnis, yakni pengumpulan dana dari peserta yang terdiri dari pekerja dan pekerja mandiri; pengelolaan dana Tapera melalui mekanisme KPDT yang dialokasikan sebagai fungsi cadangan, KIK, dan fungsi pemanfaatan melalui instrumen investasi dalam negeri; serta pembiayaan perumahan peserta dengan tingkat bunga lebih rendah dari tingkat bunga pembiayaan perumahan komersial bagi peserta MBR. Adapun peserta non-MBR dapat mengambil simpanan beserta imbal hasil pemupukan dana saat masa kepesertaan berakhir.

Nonformal

Sementara itu, pembiayaan perumahan bagi MBR non-formal hingga kini dinilai masih tertinggal.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna menyebutkan, 59,95 persen penduduk Indonesia bekerja pada sektor nonformal.

Dari jumlah itu, 74 persen di antaranya belum memiliki rumah. Sedangkan dari 26 persen yang sudah memiliki rumah, 87 persen butuh perbaikan rumah. (L&T)

Judul	Pembiayaan Rumah MBR Informal Masih Tertinggal	Tanggal	4 April 2022
Media	Investor Daily, 4 April, Halaman 7		
Resume	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna menyebutkan, 59,95 persen penduduk Indonesia bekerja pada sektor nonformal. Dari jumlah itu, 74 persen di antaranya belum memiliki rumah. Sedangkan dari 26 persen yang sudah memiliki rumah, 87 persen butuh perbaikan rumah.		

Pembiayaan Rumah MBR Informal Masih Tertinggal

JAKARTA – Pembiayaan perumahan informal masih tertinggal dalam target realisasi pembiayaan bersubsidi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Perlu langkah nyata dalam bentuk kebijakan, instrumen, dan alokasi, guna mewujudkan kebijakan publik ekosistem pembiayaan mikro perumahan bagi MBR nonformal.

Oleh Imam Mudzakir

Hal itu harus dilakukan agar tidak terjadi darurat pembiayaan perumahan rakyat khususnya bagi MBR nonformal. Demikian benang merah *Focus Group Discussion* "Mewujudkan Ekosistem Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi MBR Non Formal, Konsep, Tantangan dan Agenda ke Depan", di Jakarta, pekan lalu.

Ketua Majelis Tinggi The HUD Institute Andrinof A. Chaniago, mengungkapkan bahwa untuk meluaskan kapasitas dan akses pembiayaan perumahan bagi MBR nonformal, penting disegerakan langkah nyata. Perlu ide-ide dan gabungan gagasan lama dan baru, yang realistis.

"Tentunya dengan tetap mencari kesamaan pandangan antarpemangku kepentingan. Pemerintah bisa memfasilitasi, memudahkan lembaga dan sumber dana non-APBN/APBD dari masyarakat, partisipasi dan kolaborasi dunia usaha/industri, dan sumber lainnya sehingga tercipta kewirausahaan sosial guna membangun pembiayaan perumahan bagi MBR non formal yang berkelanjutan," kata Andrinof, Jumat (31/3).

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna menyebutkan, sebanyak 59,95% masyarakat bekerja pada sektor nonformal. Sebanyak 74%



Herry Trisaputra Zuna

di antaranya belum memiliki rumah. Sedangkan dari 26% yang sudah memiliki rumah, 87% di antaranya memerlukan perbaikan rumah. Sementara itu, dari 74% yang belum memiliki rumah itu, sebanyak 41% di antaranya, ingin membangun rumah sendiri.

"Karena itulah pembiayaan mikro perumahan bagi MBR nonformal merupakan tantangan yang serius ke depan. Bagaimana kita bisa membangun lewat skema program yang sudah ada dan terus dikembangkan," ujarnya.

Dia menambahkan, jenis hunian juga perlu menjadi perhatian. Sementara itu, urbanisasi yang semakin tinggi dan berpusat di kota juga harus diselesaikan biar tidak terjadi *defocusing*. Skema renovasi, membangun rumah secara bertahap dan rumah tumbuh adalah skema yang sudah berjalan yang perlu ditingkatkan.

Perlu disiapkan perangkat agar sektor informal bisa masuk ke formal. Pilihan pembiayaan yang sudah ada harus terus dikembangkan namun jangan sampai bertabrakan satu sama lain. "Segmentasi harus dirancang secara benar dan terstruktur. Sanitasi dan air minum yang sebelumnya minim perhatian, harus diprioritaskan atau diintegrasikan," tegas Herry.

Menurut Iwan Suprijanto, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, strategi penanganan penyediaan perumahan bagi masyarakat pekerja nonformal selama ini sudah dilakukan pemerintah. Strategi itu adalah dengan pengembangan rumah umum sewa terjangkau bagi MBR di 10 kawasan metropolitan dalam wujud hunian vertikal.

Kemudian, tambahnya, penguatan kelembagaan rumah umum melalui BP3 dan Perumnas, mendorong KPBU, Peningkatan PSU, penyusunan regulasi Badan Pelaksanaan Rumah Umum, serta penyediaan *voucher* sewa perumahan umum bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

"Tidak hanya sisi kebijakan, pemerintah sudah menyusun pembiayaan adaptif bagi MBR dengan membuat *linkage* program pembiayaan mikro UMKM dengan perumahan, memberdayakan dan menugaskan BTN, BRI, dan PNM untuk pembiayaan perumahan mikro," lanjut Iwan.

Penyaluran FLPP

Sementara itu, Nostra Tarigan, deputy komisioner BP Tapera bidang Hukum dan Administrasi menyebutkan, selama periode 2010-2021 real-

isasi penyaluran dana FLPP, masih didominasi oleh pekerja formal (827.052 unit). Di sisi lain, pekerja nonformal (meliputi petani, nelayan, wiraswasta murni, dan pekerja sektor jasa lainnya) baru mencapai 116.527 unit.

Untuk bank penyalur FLPP terbesar untuk pekerja informal yaitu BTN dan BTN Syariah, sebanyak 68.704 unit. Wilayah penyaluran FLPP terbesar untuk pekerja informal yaitu di provinsi Jawa Barat sebanyak 24.516 unit.

BP Tapera sebagai katalis Pembiayaan Perumahan MBR nonformal, lanjut Nostra, memiliki beberapa program strategis. Di antaranya adalah melakukan akuisisi peserta dan pengelolaan kepesertaan, pengumpulan dan pengembalian tabungan, pemetaan risiko serta menyiapkan produk pembiayaan perumahan bagi MBR nonformal.

BP Tapera juga menjadi pusat database terhadap peserta pekerja nonformal dan menyalurkan pembiayaan perumahan kepada peserta dengan asas gotong royong.

"BP Tapera akan bekerja sama dengan program dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta serta platform dan komunitas untuk kolaborasi program dan data yang memungkinkan MBR nonformal menjadi lebih mudah dijangkau serta membantu menekan risiko bagi perbankan. Dana Tapera yang ditempatkan di bank/ lembaga penyalur dapat disalurkan kepada MBR nonformal dalam bentuk produk pembiayaan yang telah disesuaikan dengan karakteristik MBR," tambahnya.